

2020

Korelasi kemiskinan dan persepsi kualitas terhadap probabilitas menyuap dalam pelayanan publik : Studi Kasus Indonesia

Maria Patricya Naibaho

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia

Yohanna Gultom

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/jke>



Part of the [Economics Commons](#), [Public Affairs, Public Policy and Public Administration Commons](#), and the [Urban Studies and Planning Commons](#)

Recommended Citation

Naibaho, Maria Patricya and Gultom, Yohanna (2020) "Korelasi kemiskinan dan persepsi kualitas terhadap probabilitas menyuap dalam pelayanan publik : Studi Kasus Indonesia," *Jurnal Kebijakan Ekonomi*: Vol. 16 : Iss. 1 , Article 3.

Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/jke/vol16/iss1/3>

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Economics & Business at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in Jurnal Kebijakan Ekonomi by an authorized editor of UI Scholars Hub.

Korelasi kemiskinan dan persepsi kualitas terhadap probabilitas menyuap dalam pelayanan publik : Studi Kasus Indonesia

Maria Patricya Naibaho, Yohanna M.L Gultom
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia
maria.patricya@ui.ac.id; yohanna.magdalena@ui.ac.id

Abstract

The study attempts to find out to what extent "grease the wheels" hypothesis can explain the bribery phenomena in Indonesia that has been done by the poor to access public services like public administration, police, health, and education. The study used cross-section data from a national survey of the Public Perception of the Corruption Trend 2018 conducted by Lembaga Survey Indonesia (LSI). The survey's respondents are 3,670 households spread in 34 provinces in Indonesia. The study shows that the grease the wheels hypothesis is found only in health sector, confirming that the characteristics of the public services determine the likelihood of the poor to bribe when the quality of the public service is poor. The result of logit regression shows that the odds ratio of the poor people that have a bad perception on the quality of public service to bribe increases by a factor of 7,61 compared to the poor people that have good perception on the quality of public service. This shows that the characteristics of public services, such as the level of rivalry, cost of alternative services, and the risk to be excluded from the public service are the determinants of bribery in public services.

Keyword: *Bribery, Corruption, Public Services, Poverty, Perceived Public Service Quality*

Abstrak

Penelitian ini mencoba untuk melihat sejauh mana hipotesis "grease the wheels" dapat menjelaskan fenomena suap di Indonesia yang dilakukan oleh masyarakat miskin untuk dapat mengakses pelayanan publik seperti administrasi publik, kepolisian, kesehatan, dan pendidikan. Studi ini menggunakan analisis data *cross-section* yang didapatkan dari survei nasional tentang Tren Persepsi Publik mengenai Korupsi tahun 2018 yang dilakukan oleh Lembaga Survey Indonesia (LSI). Survei nasional tersebut memiliki 3,670 responden yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia. Penelitian ini menemukan bahwa hipotesis "grease the wheels" hanya ditemukan di sektor kesehatan, menunjukkan bahwa karakteristik pelayanan publik turut menentukan kecenderungan masyarakat miskin untuk melakukan suap saat pelayanan publik kurang baik. Hasil dari regresi logit menunjukkan kelompok masyarakat miskin yang memiliki persepsi bahwa kualitas pelayanan kesehatan di daerahnya buruk secara signifikan mengalami kenaikan rasio peluang untuk menyuap sebesar faktor 7,61 dibanding masyarakat miskin yang memiliki persepsi bahwa kualitas pelayanan kesehatan di daerahnya sudah baik. Hal ini memperlihatkan bahwa karakteristik layanan seperti tingkat rivalitas, biaya pelayanan alternatif, dan resiko ketika tidak mendapatkan pelayanan menjadi faktor yang menentukan perilaku suap dalam pelayanan publik.

Penelitian ini berusaha untuk melihat korupsi dari sisi permintaan (*demand*) atas pelayanan birokrasi tingkat bawah atau *street-level bureaucrat*¹. Menurut hipotesis “*grease the wheels*”, yang dikemukakan oleh Huntington (1968) dan Meon & Weill (2010) korupsi bermanfaat bagi negara-negara berkembang yang memiliki institusi yang lemah. Korupsi dipandang sebagai jalan informal yang membantu masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dari institusi formal (Lavallée & Mireille Razafindrakoto, 2008). Beberapa penelitian menunjukkan bahwa masyarakat miskin memiliki korelasi positif dengan kasus penyuapan ketika mengakses pelayanan publik (Justesen & Bjornskov, 2014; Mbate, 2017). Studi ini akan berfokus kepada penduduk miskin ketika mengakses pelayanan publik karena mereka ialah kelompok yang paling rentan untuk mendapatkan kualitas pelayanan publik yang buruk. Seperti dalam *grease hypothesis*, apabila seseorang mendapatkan pelayanan publik yang buruk, maka ia akan menggunakan suap sebagai cara untuk dapat mendapatkan pelayanan publik. Selain itu, masyarakat miskin seringkali tidak memiliki informasi mengenai hak-hak pelayanan publik yang dapat mereka terima. Sehingga mereka memberikan uang atau hadiah kepada pegawai pemerintah tanpa menyadari bahwa itu ialah tindakan suap atau mereka menjadi korban eksploitasi oleh oknum birokrat. Dalam

studinya di Peru, (Hunt, 2007) menyimpulkan bahwa seseorang yang sedang tertimpa kemalangan seperti kehilangan pekerjaan atau korban tindak kriminal memiliki kecenderungan menyuap lebih tinggi dari orang lain. Ia menyatakan bahwa korupsi seperti memukul seseorang saat mereka jatuh. Sejauh mana hipotesis “*grease the wheels*” ini berlaku di berbagai jenis pelayanan publik dan bagaimana kemiskinan turut memengaruhi perilaku korupsi ini masih merupakan pertanyaan terbuka yang perlu dijawab melalui penelitian empiris.

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan sejauh mana kecenderungan penduduk miskin yang memiliki persepsi buruk terhadap kualitas layanan melakukan suap kepada pegawai pemerintah untuk dapat mengakses pelayanan publik seperti administrasi publik, kepolisian, kesehatan, dan pendidikan dengan mengambil kasus di Indonesia. Penelitian mengenai determinan tindak penyuapan di Indonesia masih belum banyak dilakukan. Penelitian yang menganalisis mengenai faktor-faktor yang memengaruhi suap telah ada, namun objek studinya ialah perusahaan (Kuncoro, 2006). Sehingga belum menangkap hubungan antara birokrat dan masyarakat umum. Padahal korupsi masih menjadi masalah besar di Indonesia. Indonesia menduduki peringkat 89 dari 180 negara dengan skor 38 dalam peringkat indeks persepsi korupsi yang dikeluarkan oleh Transparansi

¹ *Street Level Bureaucrat* ialah pegawai pemerintah yang menyediakan pelayanan publik. Dalam melaksanakan tugasnya, petugas ini berhubungan

secara langsung dengan masyarakat ketika melakukan tugasnya.

Internasional tahun 2018. Menurut data dari website Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kasus penyuapan ialah kasus yang paling banyak ditangani oleh KPK. Jumlahnya pun meningkat pesat. Pada tahun 2010 sebanyak 19 kasus ditangani, sementara pada tahun 2018, jumlahnya naik hingga mencapai 168 kasus.

Berbagai bentuk pelayanan publik yang memiliki karakteristik yang berbeda-beda dalam hal penyediaan layanan, rivalitas dalam mengakses dan dampak ketika tidak dapat mengakses menjadi perhatian dalam penelitian ini. Penelitian ini berasumsi bahwa persepsi masyarakat atas kualitas pelayanan publik adalah faktor yang turut menentukan kecenderungan masyarakat miskin untuk melakukan suap. Studi mengenai korupsi dari birokrasi tingkat bawah di berbagai sektor telah banyak dilakukan misalnya pada sektor kepolisian (Fried, Lagunes, & Venkataramani, 2010), sektor kesehatan (Hunt, 2010), dan sektor pendidikan (Shaw, Pecoraro, & Katsait, 2015). Determinan terjadinya korupsi dalam setiap sektor juga berbeda-beda. Menurut penelitian dari Fried, Lagunes, & Venkataramani (2010) menyimpulkan bahwa bias dari polisi dan status sosial ekonomi seseorang mempengaruhi probabilitas seorang untuk dimintai suap. Sementara penelitian Hunt (2010) di sektor kesehatan menyatakan bahwa kelompok masyarakat kaya memiliki kecenderungan lebih besar untuk menyuap ketika

mengakses pelayanan kesehatan di Uganda. Bukti empiris mengenai determinan seseorang melakukan suap dibutuhkan agar pemangku kepentingan dapat membuat prioritas kebijakan dan formulasi kebijakan anti-korupsi yang tepat sasaran dengan mempertimbangkan status perekonomian, kualitas pelayanan, dan karakteristik pelayanan dari suatu institusi.

Studi ini akan menggunakan data survey nasional Tren Persepsi Publik mengenai Korupsi yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada bulan Oktober 2018. Variabel penyuapan yang digunakan ialah pengalaman responden ketika mengakses pelayanan publik. Sementara variabel kemiskinan menggunakan proksi jumlah peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). Peserta PBI ialah fakir miskin dan orang tidak mampu yang kriterianya telah ditetapkan dan diverifikasi oleh pemerintah.² Variabel dari kualitas pelayanan ialah variabel persepsi responden atas kualitas dan kondisi pelayanan publik di sekitar mereka.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Penelitian ini hanya mampu menunjukkan hubungan korelasi diantara variabelnya. Survei ini dilakukan untuk mengukur persepsi dari masyarakat Indonesia mengenai korupsi, program pemerintah dan keadaan sosial di sekitar mereka, sehingga kita tidak dapat sepenuhnya menganulir keberadaan bias

² Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan

dan perubahannya melalui Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015.

dalam diri responden. Selain itu, studi ini juga menemukan kecenderungan responden untuk menjawab tidak tahu atau menolak menjawab seperti yang sering terjadi pada survei-survei serupa ini, misalnya *European Social Survey Round 2012* (Peiffer & Rose, 2018). Selain itu, persepsi kualitas layanan dalam di dalam studi ini tidak secara khusus menanyakan mengenai pelayanan di institusi tersebut, namun menggunakan pertanyaan kualitas layanan umum di daerah tempat tinggal responden.

Penelitian ini menggunakan metode regresi logistik dengan *weight sampling* untuk menangkap sampling yang akurat berdasarkan populasi di Indonesia. Menggunakan data *cross section* hasil survey nasional Tren Persepsi Publik mengenai Korupsi yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada bulan Oktober 2018. Survei ini dilakukan di 34 provinsi di Indonesia, dengan oversampling di enam provinsi yaitu: Sumatera Utara, Riau, Aceh, Banten, Jawa Timur, dan Maluku Utara. Total keseluruhan responden ialah 3.670 rumah tangga.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat korelasi positif antara masyarakat miskin yang memiliki persepsi kualitas pelayanan buruk dengan kecenderungannya untuk menyuap di sektor kesehatan. Rasio peluang masyarakat miskin dengan persepsi buruk untuk menyuap meningkat dengan faktor 7,61 kali daripada masyarakat miskin yang memiliki persepsi pelayanan baik disektor

kesehatan dengan tingkat signifikansi 99%. Hal ini mengindikasikan, kelompok miskin berpikir seperti hipotesis *grease the wheels* dalam sektor kesehatan. Hal ini juga menunjukkan bahwa tingkat rivalitas yang tinggi, biaya untuk pelayanan alternatif dan resiko yang besar ketika tidak mendapatkan pelayanan kesehatan menjadi faktor yang memengaruhi masyarakat miskin untuk menyuap. Namun korelasi tersebut tidak ditemukan di ketiga sektor pelayanan publik yang lain. Dalam sektor administrasi publik dan pendidikan ditemukan bahwa kelompok masyarakat tidak miskin yang memiliki persepsi buruklah yang lebih cenderung untuk menyuap.

HIPOTESIS GREASE THE WHEELS VS SAND THE WHEELS

Pembahasan mengenai hipotesis *grease the wheels* maupun *sand the wheels* biasanya terjadi ketika membahas “dampak” dari korupsi, seperti pengaruh korupsi terhadap pertumbuhan ekonomi (Mauro, 2004; Akai, Horiuchi, & Masayo, 2005), efisiensi pemerintah (Meon & Sekkat, 2005), dan kepercayaan terhadap pemerintah (Habibov, Afandi, & Cheung, 2017). Namun dalam penelitian ini, asumsi dari *grease the wheels* akan digunakan untuk mendalami motivasi kelompok miskin ketika mereka melakukan suap pada saat mengakses pelayanan publik di Indonesia. Salah satu dasar dari perdebatan antara hipotesis *grease the wheels* dan *sand the wheels* ialah mengenai peran korupsi dalam institusi yang lemah. Hipotesis *sand the wheels* berpendapat bahwa korupsi akan

semakin merusak institusi yang telah buruk. Pejabat pemerintah yang korup akan mencari cara menunda tugasnya untuk mencari kesempatan meminta suap dari masyarakat (Myrdal, 1971). Sementara hipotesis *grease the wheels* menganggap suap dapat menjadi pelumas atau alat yang mengakomodasi proses birokrasi yang lambat (Leys, 1965). Suap dapat mempercepat pelayanan publik dan memotong proses birokrasi yang berjenjang. Suap juga dapat menjadi jaminan bagi seseorang untuk menjalankan usahanya ketika ia berasal dari golongan minoritas maupun kelompok yang bertentangan dengan pemerintah (Meon & Weill, 2010).

Masyarakat miskin ialah kelompok yang rentan untuk mendapatkan pelayanan publik yang buruk. Berbagai literatur memperlihatkan adanya hubungan positif antara kemiskinan dan kerentanan untuk menyuap. Pendekatan perbedaan kesempatan hidup menjelaskan bahwa masyarakat miskin lebih rentan untuk menyuap karena tidak memiliki pengetahuan, sumber daya finansial, dan koneksi sosial untuk dapat menghindari perilaku suap, sehingga mereka menjadi target mudah bagi birokrasi (Weber, 1958). Kerentanan penduduk miskin terhadap perilaku suap juga dapat dipengaruhi oleh akses mereka terhadap pelayanan publik, yaitu pada saat mereka tidak mampu membayar biaya alternatif, mereka harus bergantung kepada pelayanan publik yang disediakan pemerintah (Justesen & Bjornskov, 2014). Dalam hal ini,

ketidakmampuan mereka untuk berpindah ke pelayanan yang disediakan oleh sektor swasta, seperti mengakses sekolah atau rumah sakit swasta, atau untuk berpindah ke tempat atau komunitas lain untuk mengakses pelayanan publik, adalah faktor yang menjelaskan kerentanan mereka terhadap perilaku suap. Sementara itu, masyarakat yang berada dalam kemiskinan absolut yang tidak dapat menyuap akan cenderung memilih untuk tidak mengakses pelayanan publik sama sekali.

Peiffer & Rose (2018) kemudian menjelaskan bahwa kecenderungan kelompok masyarakat miskin untuk menyuap juga dipengaruhi oleh institusi pelayanan publik yang diakses. Dengan mengambil kasus di Afrika, mereka menemukan bahwa masyarakat miskin cenderung melakukan suap untuk mengakses pelayanan publik yang memiliki alternatif, seperti kesehatan dan pendidikan, dibandingkan pelayanan publik yang dimonopoli oleh pemerintah, seperti kepolisian dan administrasi publik.

Hipotesis *grease the wheels* bahwa korupsi menguntungkan hanya terjadi dengan asumsi institusi di negara tersebut lemah. Salah satu penilaian atas baik dan buruknya suatu institusi pemerintah ialah kepuasan masyarakat atas pelayanan yang diterimanya. Hal ini sesuai dengan studi Kaufmann D. (1999b) dalam pembentukan indeks komposit pemerintahan dimana salah satu variabel yang digunakan untuk mengukur efektivitas pemerintah ialah persepsi kualitas pelayanan publik. Penilaian individu atas kualitas suatu

institusi terbentuk berdasarkan konteks sosial dan budaya yang ia miliki (Searle, 1995).

Ketika masyarakat memberikan label kepada suatu institusi seringkali label itu menjadi ramalan yang kemudian terjadi. Artinya ketika masyarakat menilai bahwa sebuah institusi buruk, maka institusi tersebut kemudian benar-benar berperilaku buruk. Saat institusi tersebut menjadi buruk, masyarakat kemudian berperilaku korup agar mereka dapat memastikan dirinya mendapatkan layanan, menghemat waktu, dan mendapatkan keuntungan ketika berhubungan dengan institusi pemerintah tersebut (Guerrero & Rodriguez-Oreggia, 2005). Sesuai dengan penelitian Cho & Kirwin (2007) yang menemukan terbentuknya lingkaran setan antara korupsi dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi.

Apabila kita menggunakan cara pandang dari para ahli pendukung hipotesis *grease the wheels* kepada kelompok miskin yang melakukan suap di Indonesia maka kita akan mendapat gambaran yang lebih jelas mengenai motivasi dari tindakan suap. Jika kelompok miskin yang telah memiliki persepsi bahwa kualitas layanan dari institusi tersebut buruk melakukan suap, maka dapat diasumsikan bahwa mereka menggunakan suap sebagai jaminan untuk mendapat layanan. Asumsi ini sejalan dengan pandangan *grease the wheels*. Sementara bagi mereka yang memiliki persepsi bahwa institusi tersebut baik, namun mereka tetap menyuap, dapat diasumsikan bahwa suap telah menjadi

kebiasaan dan budaya di diri mereka. Sehingga proses melakukan suap tidak lagi menjadi faktor bagi mereka dalam menilai suatu institusi. Dimana hal ini akhirnya merugikan kelompok tersebut karena mereka harus membayar biaya yang lebih tinggi dari biaya formal yang seharusnya dibayarkan. Hal ini mengantarkan kita kepada hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini yaitu:

H1: Kelompok miskin yang memiliki persepsi kualitas pelayanan publik buruk akan memiliki kecenderungan menyuap lebih besar ketika mengakses pelayanan publik.

PELAYANAN PUBLIK DI INDONESIA

Tabel 2.1 menunjukkan karakteristik pelayanan publik yang digunakan di dalam penelitian ini. Karakteristik pelayanan juga dapat memengaruhi kecenderungan seseorang untuk menyuap. Beberapa karakteristik yang digunakan dalam studi

negara tidak dapat dikecualikan untuk mengakses keempat layanan publik dalam penelitian. Hal ini karena menurut undang-undang, administrasi publik seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan akte kelahiran ialah hak seluruh warga negara, begitu juga perlindungan kepolisian. Di bidang kesehatan, Indonesia

Tabel 2.1 Karakteristik Pelayanan Publik

<i>Karakteristik</i>	<i>Jenis Pelayanan Publik</i>			
	<i>Administrasi Publik</i>	<i>Kepolisian</i>	<i>Kesehatan</i>	<i>Pendidikan</i>
<i>Penyedia Layanan</i>	<i>Monopoli Pemerintah</i>	<i>Monopoli Pemerintah</i>	<i>Pemerintah dan Swasta</i>	<i>Pemerintah dan Swasta</i>
<i>Pengecualian (Excludeable)</i>	<i>Tidak</i>	<i>Tidak</i>	<i>Tidak</i>	<i>Tidak</i>
<i>Rivalitas (Rivalry)</i>	<i>Tidak, namun memiliki birokrasi</i>	<i>Tidak</i>	<i>Sedang – Tinggi</i>	<i>Rendah – Tinggi</i>
<i>Resiko Tidak Mendapatkan Layanan</i>	<i>Rendah – Tinggi</i>	<i>Rendah – Tinggi</i>	<i>Sedang – Tinggi</i>	<i>Sedang – Tinggi</i>
<i>Periode dampak</i>	<i>Jangka panjang</i>	<i>Jangka pendek – panjang</i>	<i>Jangka pendek – panjang</i>	<i>Jangka panjang</i>

Sumber: penulis, 2019

ini ialah mengenai penyedia layanan, konsep barang publik, dan yang terakhir ialah tingkat urgensi dari pelayanan tersebut.

Karakteristik pertama ialah penyedia layanan, sektor pelayanan administrasi publik dan kepolisian disediakan oleh pemerintah. Sementara sektor kesehatan dan pendidikan disediakan oleh pemerintah dan swasta. Perbedaan biaya antara pelayanan yang disediakan pemerintah dan swasta cukup besar.

Karakteristik selanjutnya diambil dari konsep public goods (Groenewegen, Spithoven, & Berg, 2010) yaitu pengecualian (excludeable) dan rivalitas (rivalry). Di Indonesia, seorang warga

telah mengadopsi Universal Health Coverage (UHC), sehingga setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Sementara untuk pendidikan, pemerintah telah merintis program wajib belajar dua belas tahun. Sehingga semua anak usia sekolah dapat mengakses pendidikan hingga tingkat Sekolah Menengah Atas/Kejuruan (SMA/SMK).

Karakter rivalitas tidak terjadi pada administrasi publik dan kepolisian. Secara teori, pengurusan dokumen publik seperti KTP, KK, dan akte kelahiran tidak mengganggu kepuasan orang lain untuk mengakses pelayanan yang sama. Namun dalam kenyataannya, ada kalanya periode

pengurusan memakan waktu lama karena format dan blangko dari dokumen tersebut tidak tersedia. Selain permasalahan ketersediaan blangko dan dokumen, masyarakat perlu berurusan dengan birokrasi yang bertingkat ketika mengurus dokumen publik. Sementara untuk sektor kepolisian, tidak ada rivalitas untuk mengakses pelayanan.

Tingkat rivalitas untuk mengakses pelayanan di sektor kesehatan tinggi, namun rivalitas ini bervariasi baik dari segi lokasi maupun tipe fasilitas kesehatan. Misalnya saja dari rasio fasilitas tempat tidur di rumah sakit di Indonesia yang rata-ratanya ialah 1,17 per 1000 penduduk (Kementerian Kesehatan, 2019). Rasio ini dapat berbeda di setiap provinsi, dimana provinsi terendah ialah Jawa Barat dengan angka 0,85 per 1000 penduduk dan yang tertinggi ialah 2,33 per 1000 penduduk di DKI Jakarta. Tentu saja kita juga harus mempertimbangkan sistem rujukan BPJS Kesehatan yang berjenjang, sehingga fasilitas kesehatan di DKI Jakarta, sebagai rujukan nasional dapat diperebutkan oleh seluruh penduduk Indonesia. Hal ini juga didukung oleh studi dari Erlangga, Shehzad, & Bloor, 2019 yang menunjukkan adanya peningkatan penggunaan pelayanan kesehatan sejak berlakunya program JKN di tahun 2014.

Di sektor pendidikan rivalitas tidak begitu tinggi. Hal ini terlihat dari rasio antara murid dengan rombongan belajar (rombel) dan tenaga pengajar. Pada tahun ajaran 2017/2018 semua jenjang pendidikan telah memenuhi ketentuan yang tercantum pada

Permendikbud Nomor 17 tahun 2017 mengenai rombel dan tenaga pengajar (BPS, 2018). Di Sekolah Dasar (SD) rasio rata-rata Indonesia ialah 23 sementara menurut undang-undang, satu rombel layakanya terdiri dari 20-28 murid, sementara rasio rata-rata di SMP ialah 28 dan menurut peraturan satu rombel terdiri dari 20-32 murid, rasio rata-rata untuk tingkat SMA ialah 30 dan menurut peraturan satu rombel terdiri dari 20 – 36 murid, rasio rata-rata untuk SMK ialah 28 dan menurut peraturan satu rombel terdiri dari 15 – 36 murid. Rivalitas biasanya terjadi dalam pendaftaran ke sekolah negeri unggulan di daerah tersebut.

Resiko ketika seseorang tidak mendapatkan pelayanan juga menjadi pertimbangan seseorang untuk mengakses layanan. Resiko ketika seseorang tidak mengakses pelayanan administrasi publik tergantung pada tingkat sosial perekonomiannya. Apabila orang tersebut tinggal di perkotaan dan memiliki kemampuan ekonomi menengah ke atas maka kebutuhannya untuk memiliki dokumen publik tinggi. Dokumen publik ini diperlukan untuk melamar sekolah, pekerjaan, dan kebutuhan hidup lainnya. Namun ketika seseorang tinggal di daerah pedesaan dengan status sosial ekonomi yang rendah, kebutuhan akan dokumen publik ini tidak terlalu dianggap penting. Seseorang dapat memperoleh pekerjaan di sektor agrikultur atau informal tanpa harus menyerahkan KTP. Kesadaran mereka untuk mengakses pelayanan publik lain juga tidak terlalu tinggi. Ketika seseorang tidak dapat

mengakses pelayanan publik, maka kerugiannya dirasakan dalam jangka panjang. Walaupun dokumen tersebut tidak diperlukan sekarang tetapi dalam jangka panjang tetap diperlukan. Resiko ketika tidak mendapatkan pelayanan kepolisian beragam mulai dari rendah ke tinggi. Resiko langsung yang dirasakan seseorang ialah situasi kemacetan atau kriminalitas tinggi. Resiko yang dirasakan seseorang ketika tidak mendapatkan pelayanan publik di sektor kepolisian dapat dirasakan dalam jangka pendek hingga panjang.

Resiko ketika seseorang tidak mendapatkan pelayanan kesehatan bergantung dari tingkat keparahan penyakitnya. Dari seluruh sektor pelayanan, sektor kesehatan memiliki resiko terbesar ketika seseorang tidak dapat mengakses layanan tersebut yaitu kematian. Seseorang dapat kehilangan nyawa atau penyakitnya semakin parah, apabila tidak mendapatkan pelayanan kesehatan saat itu juga. Dampak ini bisa pula dirasakan dalam jangka panjang, misalnya kondisi kelumpuhan karena penyakit yang tidak diobati. Di sektor pendidikan, resiko yang dirasakan seseorang ketika tidak mendapatkan pelayanan ialah tinggi karena berhubungan dengan kehidupan di masa depannya. Namun realisasi akan resiko ini baru dirasakan dalam jangka panjang.

DATA DAN MODEL PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode regresi logit dengan kontrol pembobotan sampling yang telah ada di dalam data LSI untuk menyesuaikan proporsi sampling dengan

populasi provinsi tersebut. Metode regresi logit digunakan karena studi ini menggunakan variabel dependen biner untuk meneliti probabilitas masyarakat miskin untuk menyuap. Selain itu, penggunaan regresi logit dilakukan dengan pertimbangan bahwa variabel independen dalam penelitian ini memiliki nilai ekstrim, dimana lebih dari 60% responden masuk ke dalam satu kelompok dummy (Hahn & Soyer, 2007). Selain itu, penggunaan regresi logit juga memungkinkan kita untuk mengubah koefisien menjadi rasio peluang, sehingga kita dapat melihat seberapa besar kemungkinan masyarakat miskin untuk menyuap ketika mengakses pelayanan publik.

Model dalam penelitian ini akan menggunakan variabel interaksi. Variabel interaksi memungkinkan kita untuk melihat perbedaan efek dari variabel independen terhadap variabel dependen berdasarkan variabel moderatornya (Jaccard, 2001). Untuk membuktikan apakah suap digunakan sebagai pelumas seperti hipotesis *grease the wheels*, maka penelitian ini akan menggunakan persepsi masyarakat atas kualitas pelayanan publik sebagai variabel moderator. Dengan begitu akan terlihat apakah variabel moderator memengaruhi keputusan masyarakat miskin untuk menyuap. Mengetahui pengaruh variabel moderator akan memungkinkan kita untuk membuat prioritas dalam kebijakan publik.

Persamaan dasar yang digunakan untuk mengukur probabilitas dalam penelitian ini ialah

$$Y = \beta_0 + \beta_1 \text{Kemiskinan} + \beta_2 \text{Kualitas Pelayanan} + \beta_3 \text{Kemiskinan} \times \text{Kualitas Pelayanan} + \beta_4 \text{Status Sosial Ekonomi} + \beta_5 \text{Nilai} + \varepsilon \quad (1)$$

Dimana Y ialah variabel dummy yang menyatakan pengalaman responden untuk menyuap dalam empat sektor pelayanan publik yaitu administrasi publik, kepolisian, kesehatan dan pendidikan. Kemiskinan ialah variabel dummy ketika responden ialah penerima bantuan KIS. Kualitas pelayanan ialah variabel dummy mengenai persepsi responden atas kualitas pelayanan publik di empat sektor pelayanan publik. Status sosial ekonomi ialah variabel yang memberikan gambaran mengenai status sosial ekonomi masyarakat seperti lokasi tempat tinggal, tingkat pendidikan, pekerjaan, usia, jenis kelamin. Variabel nilai ialah variabel yang menangkap nilai-nilai agama dan pandangan responden terhadap praktek korupsi.

Ketika memasukkan variabel interaksi di dalam model, interpretasi atas koefisien β_1 dan β_2 akan berubah (Jaccard, 2001). Dimana β_1 ialah rasio peluang dari perbandingan responden miskin dan tidak miskin yang memiliki persepsi baik terhadap kualitas pelayanan. Sementara β_2 ialah rasio peluang dari perbandingan responden yang memiliki persepsi buruk dan persepsi baik atas kualitas layanan publik diantara kelompok tidak miskin. Dan β_3 ialah selisih rasio peluang

perbandingan antara kelompok miskin yang memiliki persepsi buruk dan baik dan perbandingan antara kelompok miskin dan tidak miskin yang memiliki persepsi buruk. Sehingga kita dapat mengartikan β_3 sebagai perubahan efek persepsi kualitas karena status sosial ekonomi, atau perubahan efek status sosial ekonomi karena persepsi kualitas.

Karena variabel dependen yang digunakan ialah variabel biner, maka persamaan satu akan diubah menjadi model regresi logistik sehingga persamaan dasar akan berubah menjadi

$$\text{Log} \left(\frac{\pi_i}{1 - \pi_i} \right) = \alpha_0 + \alpha_1 \text{Kemiskinan} + \alpha_2 \text{Kualitas Pelayanan} + \alpha_3 \text{Kemiskinan} \times \text{Kualitas Pelayanan} + \alpha_4 \text{Status Sosial Ekonomi} + \alpha_5 \text{Nilai} + \varepsilon \quad (2)$$

Dimana $\pi_1 = P(Y_i = 1)$ dan $1 - \pi_1 = P(Y_i = 0)$ dan estimasi empiris akan dapat diinterpretasikan sebagai rasio peluang atau probabilitas.

Penelitian ini menggunakan data cross section hasil survey nasional Tren Persepsi Publik mengenai Korupsi yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada bulan Oktober 2018. Survei ini menggunakan teknik multistage random sampling. Dalam pemilihan responden, survei tersebut menggunakan tiga strata yaitu provinsi/kabupaten, pedesaan - perkotaan, dan jenis kelamin. Primary Sample Units (PSUs) dipilih secara acak. Jumlah dari PSU di setiap provinsi ditentukan berdasarkan luas wilayah dan kepadatan suatu provinsi. Untuk mengisi

survei ini, responden harus berusia diatas 19 tahun. Dalam survei ini, LSI melakukan oversampling di enam provinsi yaitu: Sumatera Utara, Riau, Aceh, Banten, Jawa Timur, dan Maluku Utara. Total dari responden oversampling adalah 1.670. Sehingga total keseluruhan responden menjadi 3.670.

Potensi masalah dari data survei ialah banyaknya responden yang tidak memberikan respon atas pertanyaan-pertanyaan dalam survei. Serupa dengan responden dalam survei European Social Survey Round 2012, sebanyak 21% responden menolak untuk menjawab dan mengatakan tidak tahu ketika ditanya mengenai pendapatan (Peiffer & Rose, 2018). Saya tidak melihat adanya solusi lain untuk mengatasi permasalahan ini, selain menandai data tersebut sebagai missing. Keputusan ini diambil karena pertanyaan dari survei ini kebanyakan bersifat persepsi individu dan data personal, sehingga tidak dapat diganti dengan nilai rata-rata atau jawaban terbanyak. Saya menyadari dengan menghilangkan observasi tersebut, akan ada informasi penting yang tidak tertangkap.

Variabel dependen yang digunakan dalam studi ini ialah pengalaman masyarakat untuk menyuap ketika mengakses pelayanan publik seperti administrasi publik, kepolisian, kesehatan, dan pendidikan. Survei ini telah merancang pertanyaan mengenai pengalaman menyuap dengan terlebih dahulu menanyakan pertanyaan filter mengenai apakah responden pernah memiliki kontak

dengan pelayanan publik tersebut. Apabila mereka telah memiliki kontak, kemudian, mereka akan ditanyakan mengenai pengalaman mereka dalam melakukan suap baik karena diminta (Q38) maupun yang mereka lakukan dengan sukarela (Q40). Setiap responden yang memberikan jawaban iya pada pertanyaan Q38 dan/atau Q40 akan diberikan kode 1.

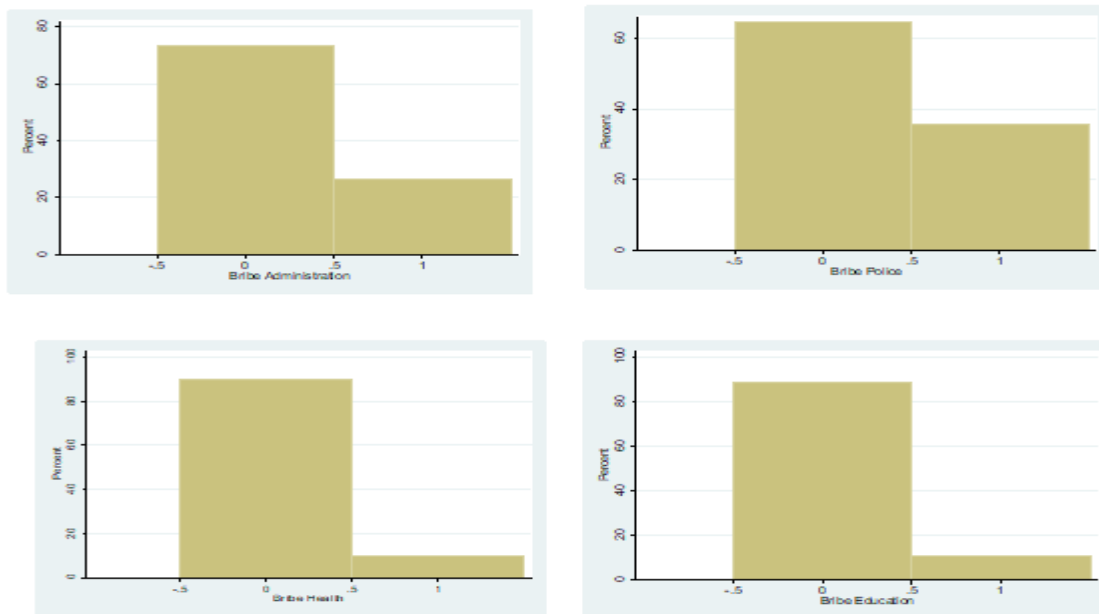
Pengertian suap yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pengertian suap yang paling luas. Dimana pengalaman suap telah memenuhi dua unsur yaitu pemberian yang berhubungan dengan jabatan atau tugas dan pemberian hadiah/uang tersebut diterima oleh pegawai pemerintah. Dikarenakan bentuk dari susunan pertanyaan sudah memenuhi ketentuan kedua hal ini maka pemberian ini dapat diklasifikasikan sebagai suap. Terlepas dari peyuapan tersebut terjadi karena permintaan hadiah/uang dari pegawai pemerintah ataupun atas inisiatif warga. Studi ini tetap menganggap responden yang memberikan hadiah/uang untuk mendapatkan pelayanan sebagai suap berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 12 B. Pasal tersebut menyatakan bahwa pemberian gratifikasi kepada penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Dimana gratifikasi dibawah sepuluh juta rupiah pembuktiannya dilakukan oleh jaksa.

Sementara permintaan dari pemerintah dianggap sebagai suap sampai terjadi pembuktian bahwa adanya tindakan pemaksaan baru kemudian dapat dianggap sebagai pemerasan.

Variabel suap dalam studi ini tidak mempertimbangkan motivasi dari masyarakat ketika memberikan hadiah/uang kepada pejabat pemerintah. Di Indonesia seringkali pemberian

disadari dapat mengubah perlakuan pejabat pemerintah dengan mendiskriminasi masyarakat yang tidak memberikan sesuatu sebagai ungkapan “terima kasih”.

Sesuai dengan grafik 3.1, pengakuan responden terhadap pengalaman menyuap dalam survei ini cenderung rendah, hanya sekitar 8% - 30% tergantung pada jenis pelayanan publik yang diakses. Hal ini serupa dengan penelitian sebelumnya yang



Sumber: Survei Nasional Tren Persepsi Publik mengenai Korupsi LSI, diolah

Grafik 3.1 Distribusi persentase pengalaman suap responden berdasarkan kontak dengan pelayanan publik

hadiah/uang kepada pegawai pemerintah dijustifikasi sebagai bagian dari budaya ramah tamah di Indonesia, yaitu bentuk rasa terima kasih atas pelayanan atau sebagai alat untuk menjaga hubungan baik. Hal ini tentu bertentangan dengan undang-undang yang mengatur bahwa pemberian semacam ini melanggar hukum. Hal serupa juga dikemukakan oleh Rose-Ackerman (2016) bahwa pemberian semacam ini dapat berfungsi sebagai suap, karena tanpa

menggunakan variabel pengalaman menyuap. Dimana pengakuan responden terhadap pengalaman menyuap cenderung lebih rendah daripada ketika ditanyakan mengenai persepsi korupsi. Hal ini dapat disebabkan oleh dua hal, pertama korupsi administrasi kecil memang sedikit, namun tingkat korupsi politik dengan jumlah besar tinggi, sehingga persepsi masyarakat akan korupsi juga menjadi tinggi. (Clausen, Kraay, & Nyiri, 2011). Kedua, menurut

Justesen & Bjornskov (2014) bias sosial dapat muncul karena responden menjawab pertanyaan survey sesuai dengan ekspektasi sosial dan tidak sesuai dengan kenyataan atau pendapat mereka sendiri.

Kemiskinan ialah variabel penjelas utama dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) sebagai proksi pengukuran kemiskinan. Studi ini menggunakan proksi peserta PBI karena dinilai lebih akurat daripada pengeluaran rumah tangga. Selain itu, survei LSI juga tidak memiliki data pemasukan rumah tangga. Data peserta PBI terintegrasi dengan Basis Data Terpadu (BDT) dikelola oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) yang telah terverifikasi. Data ini terus diperbaharui untuk menyesuaikan perubahan taraf hidup penerima bantuan atau apabila ada peserta yang telah meninggal dunia. Walaupun begitu, tidak dipungkiri bahwa masih ada misalokasi manfaat PBI diterima oleh masyarakat tidak miskin (Worldbank, 2017).

Variabel penjelas kedua yang digunakan ialah persepsi responden atas kualitas pelayanan publik. Indikator kuantitatif dari pemerintahan bergantung pada evaluasi subyektif rakyat (Meon & Weill, 2010). Studi ini juga menggunakan persepsi atas kualitas pelayanan dari suatu institusi untuk mengukur tingkat kekuatan dan kelemahan dari institusi. Apabila responden merasa bahwa kualitas atau kondisi pelayanan buruk, maka dapat diasumsikan bahwa

institusi tersebut lemah. Responden yang menjawab kondisi dan kualitas pelayanan di daerah tempat tinggalnya sebagai buruk dan sangat buruk diberikan kode 1.

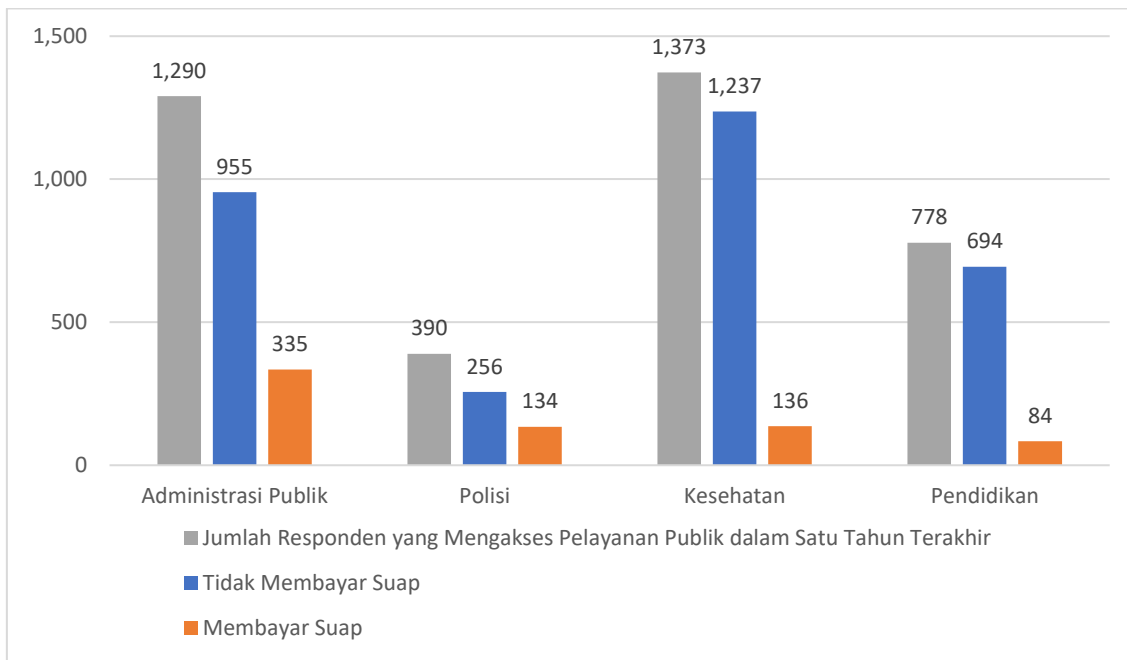
Penelitian ini akan menggunakan beberapa variabel kontrol yaitu status sosial ekonomi dan nilai-nilai yang dipegang oleh responden. Variabel status sosial ekonomi yang termasuk ke dalamnya ialah lokasi tempat tinggal, mereka tinggal di urban (1) atau rural (0). Hal ini penting karena implikasi dari kemiskinan terhadap korupsi memiliki perbedaan tergantung dari daerah tempat tinggal mereka (Justesen & Bjornskov, 2014). Variabel kedua ialah pendidikan, dimana nilai minimum 0 digunakan untuk seseorang yang tidak menyelesaikan wajib belajar sembilan tahun. Kode 1 untuk lulusan SMP, kode 2 untuk lulusan SMA, dan kode 3 untuk lulusan Diploma hingga Doktor. Selanjutnya jenis kelamin, dimana wanita diberikan kode 1 dan laki-laki diberikan kode 0. Kemudian pekerjaan, apabila responden bekerja diberikan kode 1 dan tidak bekerja diberikan kode 0. Dan yang terakhir ialah dummy wiraswasta, apabila responden bekerja sebagai wiraswasta diberikan kode 1 dan apabila tidak diberikan kode 0. Jenis pekerjaan wiraswasta dimasukkan sebagai variabel kontrol karena kemungkinan mereka berinteraksi dengan pegawai pemerintah lebih banyak.

Penelitian ini juga menggunakan nilai-nilai individual yang dipegang oleh responden sebagai variabel kontrol. Nilai-nilai keagamaan seringkali digunakan sebagai

variabel yang menjelaskan mengenai korupsi. Ada studi yang mengatakan bahwa negara yang memiliki hierarki agama yang kuat cenderung korup, namun penelitian dari Ko & Moon (2014) membantah

HASIL DAN ANALISIS

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan LSI, jenis pelayanan publik yang paling banyak diakses publik secara berturut-turut ialah kesehatan, administrasi publik,



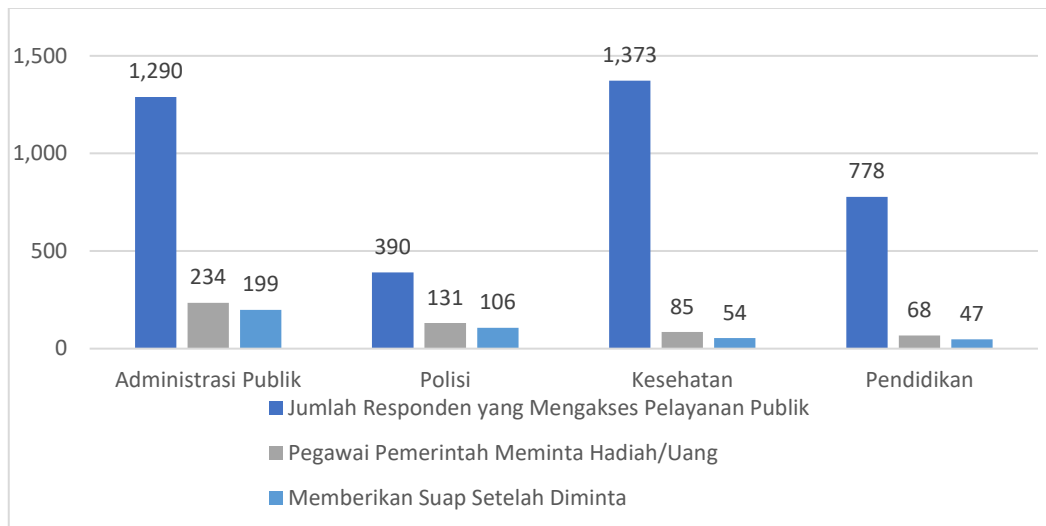
Sumber: Survei Nasional Tren Persepsi Publik mengenai Korupsi LSI, diolah

Grafik 3.2 Jumlah Responden yang Mengakses Pelayanan Publik

hubungan kausal tersebut. Sehingga, penelitian ini akan menggunakan nilai-nilai keagamaan sebagai variabel kontrol untuk melihat kecenderungan responden untuk menyuap atau tidak. Variabel nilai kedua yang digunakan ialah nilai anti-korupsi untuk melihat apakah nilai seseorang yang permisif atau tidak permisif terhadap korupsi tercermin dalam perbuatannya. Apabila responden menjawab tidak wajar untuk memberikan hadiah/uang kepada pegawai pemerintah akan diberikan kode 1 dan wajar diberikan kode 0. Sementara responden yang menjawab tidak tahu atau menolak menjawab ditandai sebagai missing.

pendidikan, dan yang paling sedikit diakses ialah kepolisian seperti yang disajikan dalam grafik 3.2.

Sementara episode suap karena diminta oleh pegawai pemerintah dalam mengakses pelayanan publik paling tinggi terjadi di sektor kepolisian. Setidaknya menurut survei, 30% responden yang mengakses layanan polisi pernah diminta hadiah/uang. Dan ketika pegawai pemerintah meminta hadiah/uang, lebih dari 60% responden memberikannya dan hanya sedikit masyarakat yang menolak seperti dalam grafik 3.3.

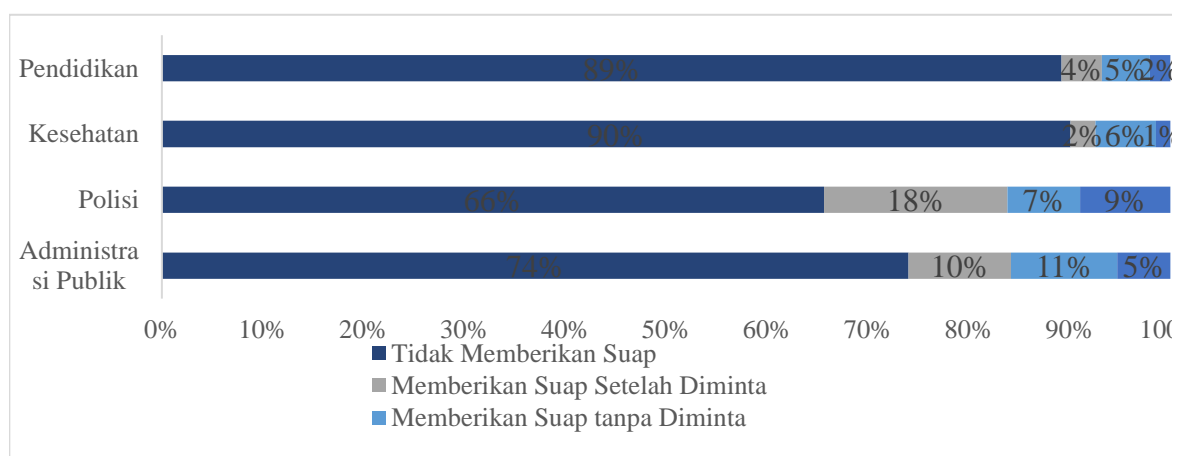


Sumber: Survei Nasional Tren Persepsi Publik mengenai Korupsi LSI, diolah

Grafik 3.3 Jumlah Responden yang Dimintai Uang/Hadiah ketika Mengakses Pelayanan Publik

Bila dilihat dari jumlah total masyarakat yang menyuap ketika mengakses pelayanan publik, jumlah responden yang menyuap pada pelayanan administrasi publik serta kesehatan lebih banyak dari kepolisian. Namun bila dibandingkan dengan kontak ke pelayanan publik, secara persentase jumlah responden yang menyuap di pelayanan kepolisian lebih tinggi sebesar 34% daripada pelayanan publik lainnya. Hal menarik juga ialah selain dari

kepolisian, jumlah responden yang memberikan suap tanpa diminta oleh pegawai pemerintah lebih tinggi daripada responden yang memberikan suap karena diminta. Kejadian ini menandakan bahwa masyarakat sudah amat terbiasa dengan praktek suap dalam mengakses pelayanan publik seperti dalam grafik 3.4.



Sumber: Survei Nasional Tren Persepsi Publik mengenai Korupsi LSI, diolah

Grafik 3.4 Persentase Responden yang Menyuap ketika Mengakses Pelayanan Publik

Tabel 3.1 menunjukkan statistik deskriptif dari variabel dari responden dalam penelitian ini. Dari tabel 3.1 dapat terlihat bahwa pengalaman menyuap terkecil ialah sebesar 8% di kesehatan dan 10% di

menurut jenis kelamin dan lokasi tempat tinggal memiliki jumlah yang hampir proporsional yaitu sekitar 52 - 63% dalam setiap pelayanan publik.

PROBABILITAS KELOMPOK

Tabel 3.1 Statistik Deskriptif

Variabel	Administrasi	Polisi	Kesehatan	Pendidika
	Mean	Mean	Mean	Mean
Pengalaman Menyuap	0.242	0.343	0.081	0.0981
Status Sosial Ekonomi				
Kemiskinan (1 = memiliki KIS, 0 = lainnya)	0.421	0.368	0.436	0.440
Urban (1 = perkotaan, 0 = lainnya)	0.535	0.630	0.546	0.527
Usia	42.21	41.11	44.15	41.45
Jenis Kelamin (1=wanita, 0 = lainnya)	0.473	0.369	0.514	0.504
Tingkat Pendidikan (1 = SMP; 2 = SMA; 3 = D1 – S3)	1.222	1.576	1.274	1.339
Pekerjaan (1 = bekerja, 0 = lainnya)	0.661	0.738	0.626	0.693
Wiraswasta (1 = wiraswasta, 0 = lainnya)	0.128	0.234	0.126	0.129
Persepsi atas Pelayanan				
Kualitas Pelayanan (1 = buruk, 0 = lainnya)	0.102	0.116	0.087	0.050
Nilai-nilai				
Mempertimbangkan Nilai-Nilai Agama (semakin sering = 1; tidak pernah = 4)	3.324	3.389	3.350	3.346
Toleransi terhadap Korupsi (1 = tidak wajar, 0 = lainnya)	0.666	0.747	0.690	0.735
Observasi	1,290	390	1,373	778

Sumber: Survei Nasional Tren Persepsi Publik mengenai Korupsi LSI, diolah

pendidikan. Hal ini berbanding lurus dengan persepsi mereka dengan kualitas pelayanan publik dimana hanya 5% responden yang menganggap kualitas pendidikan di daerah mereka buruk. Dan hanya 8% yang menganggap kualitas kesehatan di sekitar mereka buruk. Namun secara umum, masyarakat menganggap bahwa pelayanan publik yang mereka terima telah baik karena jumlah responden yang menganggap kualitas pelayanan publik di sekitar mereka buruk hanya sekitar 5 – 11%. Sebaran responden

MISKIN MENYUAP UNTUK MENGAKSES PELAYANAN PUBLIK

Berdasarkan hasil regresi logit di tabel 4.1 terlihat bahwa hipotesis dalam penelitian ini tidak sepenuhnya terbukti. Hal ini terlihat dari kecenderungan masyarakat miskin yang memiliki persepsi buruk untuk menyuap tidak memiliki nilai yang signifikan di semua jenis pelayanan publik. Kenaikan probabilitas untuk menyuap hanya terbukti secara signifikan di sektor kesehatan dan tidak di tiga sektor pelayanan lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa jenis

dan karakteristik dari pelayanan publik turut memengaruhi kecenderungan masyarakat miskin untuk menyuap.

Berdasarkan tabel 4.1, kita dapat melihat bahwa masyarakat miskin yang memiliki persepsi bahwa kualitas layanan buruk

memiliki kecenderungan yang lebih besar untuk menyuap di sektor kesehatan dengan tingkat signifikansi 99%. Dengan prediksi rasio peluang masyarakat miskin yang memiliki persepsi buruk untuk menyuap

Tabel 4.1 Probabilitas Kelompok Miskin Menyuap untuk Mengakses Pelayanan Publik

VARIABLE	Bribe Administration		Bribe Police		Bribe Health		Bribe Education	
	Base	Control	Base	Control	Base	Control	Base	Control
Poor	0.261 -0.169	0.216 -0.174	0.167 -0.282	0.194 -0.306	-0.322 -0.253	-0.413 -0.271	0.0947 -0.291	0.115 -0.307
Public Service Quality	1.013*** -0.269	1.039*** -0.284	0.674 -0.458	0.547 -0.465	-0.394 -0.589	-0.453 -0.61	1.121* -0.599	1.095* -0.615
Poor x Pub Serv Quality	0.219 -0.473	0.143 -0.498	0.514 -0.816	0.721 -0.753	2.331*** -0.736	2.443*** -0.763	-1.109 -1.23	-1.012 -1.228
Urban		0.316* -0.174		0.11 -0.28		-0.475* -0.259		0.0471 -0.316
Age		-0.0167** -0.00692		-0.0273** -0.0119		-0.0435*** -0.0095		-0.0268* -0.0152
Gender		-0.133 -0.2		-0.446 -0.336		-1.007*** -0.333		-0.201 -0.363
Education		-0.240*** -0.0842		-0.102 -0.149		-0.211 -0.135		0.0465 -0.166
Employment		-0.0512 -0.219		0.128 -0.387		-0.408 -0.357		-0.0773 -0.421
Business		0.316 -0.24		0.0771 -0.34		0.900*** -0.335		0.45 -0.432
Religious		-0.154 -0.107		-0.539*** -0.195		0.00801 -0.163		-0.283 -0.21
Perceive Corruption		-0.771*** -0.167		-0.0958 -0.337		-0.896*** -0.244		-0.434 -0.317
Constant	-1.403*** -0.116	0.473 -0.495	-0.808*** -0.176	2.299*** -0.89	-2.398*** -0.155	1.066 -0.729	-2.291*** -0.196	-0.00853 -0.884
Observations	1,336	1,290	399	390	1,413	1,373	797	778
Pseudo R2	0.023	0.067	0.017	0.068	0.03	0.12	0.0078	0.0334

Catatan: tingkat keyakinan 99% (***), 95% (**), 90% (*). Robust standard errors pada tanda kurung.

naik sebesar faktor 7,614³ dibandingkan kelompok masyarakat miskin yang memiliki persepsi baik. Kecenderungan ini mengindikasikan bahwa masyarakat miskin menggunakan suap sebagai alat untuk memastikan dirinya mendapatkan pelayanan kesehatan, seperti asumsi pada hipotesis *grease the wheels*.

Fenomena ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama, biaya untuk menyuap lebih kecil daripada pelayanan kesehatan milik swasta. Kedua, rivalitas untuk mengakses layanan kesehatan cukup tinggi di Indonesia, terutama di rumah sakit pemerintah. Walaupun Indonesia sudah memiliki program JKN namun masih ditemui beberapa kelemahan yang membuka kemungkinan untuk terjadinya suap. Misalnya, ketidakpastian (*uncertainty*) akan mendapat kamar di rumah sakit atau puskesmas. Beberapa kali kita melihat di berita mengenai adanya pasien KIS yang ditolak karena kamar di rumah sakit tersebut sudah habis. Kondisi ketidakpastian ini membuka celah untuk terjadi suap diantara calon pasien dan petugas di bagian pendaftaran. Terutama di rumah sakit atau puskesmas yang belum memiliki sistem teknologi informasi yang canggih. Ketiga, resiko untuk tidak mendapatkan layanan dari tinggi, dimana pelayanan ini menyangkut nyawa seseorang. Ditambah lagi masyarakat

membutuhkan pelayanan yang cepat pada sektor kesehatan. Sehingga membayar suap dirasakan sebagai keputusan yang rasional bagi masyarakat miskin.

Pada sektor pendidikan, masyarakat tidak miskin yang memiliki persepsi buruk yang memiliki kecenderungan untuk menyuap lebih besar. Dimana rasio peluang untuk masyarakat tidak miskin yang memiliki persepsi buruk untuk menyuap ialah sebesar 2,99 kali masyarakat tidak miskin yang memiliki persepsi baik dengan tingkat keyakinan 99%.

Sektor kesehatan dan pendidikan ialah pelayanan publik yang memiliki alternatif penyedia. Perbedaan biaya untuk mengakses biaya alternatif, yaitu rumah sakit dan sekolah swasta juga besar. Namun rivalitas untuk mengakses pelayanan publik keduanya berbeda. Pada sektor kesehatan, rivalitas untuk mengakses pelayanan publik hampir merata di seluruh Indonesia. Sementara rivalitas di sektor pendidikan hanya terjadi pada sekolah negeri unggulan. Hal ini juga didukung oleh data dari BPS (2018), dimana angka partisipasi murni semakin rendah ketika jenjang pendidikan semakin tinggi. Di tahun 2018 tercatat 98% siswa yang masuk ke SD namun hanya 21% yang terdaftar di SMA. Ketimpangan ini juga semakin tinggi apabila dilihat dari perekonomian rumah tangga. Dimana

³ Secara intuisi, efeknya ialah $-0,413 + 2,443^*$ persepsi kualitas layanan. Hal ini mengindikasikan bahwa ketika kualitas pelayanan kesehatan baik (kualitas pelayanan = 0), rasio peluang seseorang untuk melakukan suap dalam mengakses layanan

kesehatan ialah $\exp(-0,413) = 0,662$. Namun, ketika seorang miskin memiliki persepsi bahwa kualitas layanan tersebut buruk (kualitas pelayanan = 1), maka rasio peluang untuk menyuap naik menjadi $(-0,413 + 2,443) = \exp(2,03) = 7,614$.

persentase rumah tangga miskin di kuintil satu yang menyelesaikan sekolah hingga SMA hanyalah 48% sementara masyarakat kaya di kuintil lima mencapai 69%. Berdasarkan jumlah peserta pendidikan, rivalitas di kelompok menengah ke atas lebih tinggi, sehingga probabilitas mereka untuk menyuap juga lebih besar.

Serupa dengan sektor pendidikan, pada sektor administrasi publik, masyarakat tidak miskin yang memiliki persepsi buruklah memiliki kecenderungan untuk menyuap lebih besar. Dimana rasio peluang untuk masyarakat tidak miskin yang memiliki persepsi buruk untuk menyuap ialah sebesar 2,83 kali masyarakat tidak miskin yang memiliki persepsi baik dengan tingkat signifikan 99%.

Studi Peiffer & Rose (2018) juga menunjukkan bahwa kelompok miskin lebih cenderung untuk menyuap di sektor pelayanan yang memiliki alternatif seperti kesehatan dan bukan yang dimonopoli pemerintah. Secara teori dokumen publik seperti KTP, KK, dan akta kelahiran merupakan hak bagi semua warga negara. Namun di lapangan seringkali ada kejadian dimana blanko KTP tersebut habis, akibatnya warga harus menggunakan KTP sementara dan menunggu dalam waktu yang lama. Praktek suap di sektor administrasi publik juga seringkali dilakukan untuk mempercepat proses pengurusan dokumen. Kesempatan untuk menyuap lebih banyak dialami oleh kelompok menengah ke atas karena mereka lebih sering melakukan pengurusan

dokumen publik baik untuk mengakses pelayanan publik lain atau menyangkut pekerjaan. Selain itu, kerugian ketika tidak mendapatkan dokumen-dokumen ini juga tidak secara langsung dirasakan masyarakat. Kesulitan biasanya baru dirasakan setelah beberapa waktu, misalnya ketika pendaftaran sekolah anak atau mencari pekerjaan.

Pada sektor kepolisian, kedua faktor penjas baik itu kelompok miskin dan kondisi keamanan tidak memiliki korelasi terhadap keputusan seseorang untuk menyuap. Hal ini dapat disebabkan karena rivalitas di sektor kepolisian hampir tidak ada. Apalagi bila mempertimbangkan kejadian suap di kepolisian biasanya bukan untuk mendapatkan insentif pelayanan, namun untuk menghindari hukuman (Rose & Peiffer, 2015). Contohnya menghindari tilang di jalan raya. Sehingga kemungkinan untuk menyuap tidak datang karena permintaan pelayanan dari masyarakat, tetapi untuk menghindari akibat pelanggaran yang mereka lakukan. Dengan pertimbangan resiko, kelompok miskin dapat memutuskan untuk menjalankan hukuman dari pelanggaran tersebut daripada harus membayar suap.

Berdasarkan variabel kontrol, usia ialah variabel yang berkorelasi dengan keputusan seseorang untuk menyuap di semua sektor. Semakin muda usia seseorang maka probabilitas ia untuk menyuap juga semakin tinggi. Menurut efek margin, ketika usia seseorang naik satu tahun berkorelasi dengan kemungkinan seseorang

untuk menyuap turun sebesar 2 basis poin di sektor administrasi publik pada tingkat kepercayaan 95%. Sementara di sektor kepolisian, ketika usia seseorang naik satu tahun korelasinya untuk menyuap turun sebesar 5 basis poin dengan tingkat signifikansi 95%. Di sektor kesehatan dan pendidikan, ketika usia seseorang naik satu tahun, korelasi untuk menyuap turun sebesar 3 basis poin di sektor kesehatan dan 2 basis poin di sektor pendidikan di tingkat kepercayaan 90%.

Jenis kelamin hanya berpengaruh di sektor kesehatan, dimana probabilitas wanita untuk menyuap lebih kecil atau menurut efek margin, turun 6 basis poin di tingkat kepercayaan 99%. Di sektor administrasi publik, tingkat pendidikan dan kecenderungan untuk menyuap memiliki hubungan korelasi negatif. Dimana jika tingkat pendidikan seseorang rendah, maka kecenderungannya untuk menyuap menjadi lebih besar dengan tingkat signifikansi 99%. Apabila pekerjaan seseorang ialah wiraswasta juga berkorelasi positif dengan probabilitas seseorang untuk menyuap di sektor kesehatan. Dimana rasio peluang

wiraswasta untuk menyuap 2,46 kali dibandingkan pekerjaan lainnya.

Variabel nilai-nilai anti korupsi dan keagamaan yang dimiliki seseorang memiliki korelasi dengan berkurangnya probabilitas seseorang untuk menyuap. Ketika seseorang mempertimbangkan nilai-nilai keagamaan untuk mengambil keputusan dalam hidupnya terlihat ada penurunan tingkat probabilitas ia untuk menyuap di sektor kepolisian dengan tingkat signifikan sebesar 99%. Sementara itu, ketika seorang memiliki nilai anti korupsi, maka probabilitasnya untuk menyuap berkurang di sektor administrasi publik dan kesehatan. Dengan rasio peluang masing-masing sebesar 0,46 dibandingkan seseorang yang menganggap bahwa korupsi ialah hal yang wajar pada sektor administrasi publik dan 0,41 di sektor kesehatan di tingkat signifikansi 99%.

DISKUSI

Berdasarkan hasil dari regresi logit dapat terlihat bahwa kecenderungan masyarakat miskin yang memiliki persepsi buruk untuk

Tabel 4.2 Karakteristik Pelayanan Publik

		Rivalitas	
		Rendah	Tinggi
Resiko tidak menerima pelayanan	Rendah	Kepolisian	Sekolah Unggulan
	Tinggi	Sekolah Umum Administrasi Publik	Kesehatan

Sumber: penulis, 2019

menyuap tidak sama di semua pelayanan publik, namun hanya berkorelasi positif di sektor kesehatan. Sehingga dapat dikatakan bahwa karakteristik dari pelayanan tersebut juga memengaruhi kecenderungan masyarakat untuk menyuap. Tabel 4.2 berusaha untuk menunjukkan karakteristik pelayanan publik yang telah disederhanakan hanya berdasarkan tingkat rivalitas dan resiko ketika seseorang tidak mendapatkan pelayanan publik. Kedua karakteristik ini dipilih karena studi ini berasumsi bahwa kedua karakteristik inilah yang paling memengaruhi keputusan masyarakat untuk menyuap. Karakter ini juga sejalan dengan penelitian lain yang menemukan bahwa permintaan yang tinggi atas suatu pelayanan (Clarkea & Xua, 2004) dan resiko (Søreide, 2009) ialah determinan untuk menyuap.

Tingkat rivalitas amat berpengaruh pada rasa kecemasan (uncertainty) untuk tidak mendapatkan pelayanan. Dengan pelayanan yang terbatas, maka masyarakat berusaha untuk menjamin diri mereka tidak keluar (crowding out) dan mendapatkan pelayanan dengan memberikan suap. Hal ini amat terlihat dalam sektor kesehatan karena sektor ini memiliki tingkat rivalitas yang tinggi. Dalam studinya, Erlangga, Shehzad, & Bloor (2019) menunjukkan adanya peningkatan penggunaan pelayanan kesehatan sejak berlakunya program JKN di tahun 2014, namun tidak diikuti dengan pembangunan fasilitas kesehatan. Di sektor pendidikan, tingkat rivalitas yang tinggi terjadi untuk mendapatkan bangku di

sekolah unggulan. Dengan bangku yang terbatas, orang tua murid berusaha untuk mendaftarkan anaknya agar mendapatkan tenaga pengajar dan fasilitas belajar yang terbaik. Selain fasilitas dan tenaga pengajar, sekolah unggulan juga menjadi tempat networking yang baik bagi siswa.

Karakteristik selanjutnya ialah resiko tidak mendapatkan pelayanan. Untuk sektor kesehatan, amat jelas bahwa ketika seseorang tidak segera mendapatkan pelayanan maka ia dapat kehilangan nyawanya. Sehingga resiko untuk tidak mendapatkan pelayanan ini amat tinggi. Sementara untuk sektor pendidikan dan administrasi publik resiko ini juga tinggi karena menyangkut kehidupan di masa depan. Pendidikan amat berpengaruh untuk menentukan pekerjaan seseorang di masa depan. Sementara administrasi publik berpengaruh dalam kepengurusan sekolah, melamar pekerjaan, mendapatkan program bantuan dari pemerintah, dan masih banyak keperluan lain.

Semua warga negara berhak untuk menerima perlindungan dan pelayanan dari kepolisian tanpa terkecuali. Dapat dikatakan pelayanan ini memiliki karakteristik tidak memiliki rivalitas. Apabila seorang polisi mengawasi satu rumah, maka tidak berarti orang dari lingkungan lain akan merasakan kekurangan pengawasan dari kepolisian. Sementara untuk pelayanan seperti Surat Izin Mengemudi (SIM) dapat diurus di daerah manapun tanpa harus terbatas di daerah domisili. Hal ini membuat

masyarakat tidak perlu bersaing untuk mendapatkannya. Resiko untuk tidak mendapatkan pelayanan kepolisian seperti SIM juga tidak besar karena masih ada kendaraan umum yang dapat dijadikan sarana transportasi. Untuk itu, hampir tidak mungkin seorang warga negara dikecualikan dalam menerima pengamanan kepolisian, maka resiko tidak menerima pelayanan menjadi rendah.

Jika kita mempertimbangkan status sosial masyarakat, dalam hal ini kelompok miskin dan menengah ke atas, maka dapat terlihat bahwa kelompok miskin akan berusaha keras untuk menjamin dirinya mendapatkan pelayanan yang memiliki karakteristik rivalitasnya tinggi dan resiko untuk tidak mendapatkan pelayanan juga berat. Sementara kelompok menengah ke atas memiliki keleluasaan untuk memastikan bahwa diri mereka mendapatkan pelayanan publik yang memiliki resiko tinggi walaupun tingkat rivalitas di dalam pelayanan itu rendah karena mereka memiliki pertimbangan lain seperti mempercepat waktu pelayanan dan mempermudah birokrasi (Hunt & Laszlo, 2012).

KESIMPULAN

Temuan utama dari studi ini adalah terdapat hubungan korelasi yang kuat antara masyarakat miskin yang memiliki persepsi bahwa kualitas pelayanan buruk terhadap probabilitas untuk menyuap di sektor kesehatan. Dimana rasio peluang masyarakat miskin yang memiliki persepsi

buruk untuk menyuap naik dengan faktor sebesar 7,614 dibandingkan kelompok masyarakat miskin yang memiliki persepsi baik. Hal ini dipengaruhi oleh karakteristik dari pelayanan kesehatan yaitu tingkat rivalitas yang tinggi, biaya untuk pelayanan alternatif besar, resiko ketika tidak mendapatkan pelayanan besar, dan dampak atas resiko tersebut langsung dirasakan saat itu juga. Sehingga suap dapat digunakan sebagai jaminan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, sesuai dengan hipotesis para ahli "grease the wheels." Sementara itu, korelasi antara masyarakat miskin dengan persepsi yang buruk tidak terlihat pada sektor pelayanan publik yang lain baik itu administrasi publik, kepolisian, dan pendidikan.

Untuk mengatasi masalah penyuapan yang dilakukan oleh masyarakat miskin, pemerintah harus memprioritaskan perbaikan kualitas layanan publik, terutama di sektor kesehatan yang banyak diakses oleh masyarakat miskin. Dengan perbaikan pelayanan, maka persepsi masyarakat miskin atas pelayanan publik tersebut juga akan membaik. Dengan demikian maka kecenderungan masyarakat untuk menyuap juga akan menurun. Untuk setiap pelayanan, pemerintah perlu untuk meningkatkan keterbukaan informasi dan akuntabilitas dari institusi tersebut. Keterbukaan dan akuntabilitas ini dapat dicapai dengan cara-cara yang sederhana seperti menetapkan nomor antrean hingga cara yang lebih teknis seperti penggunaan teknologi untuk mengganti tatap muka

antara staf penyedia pelayanan publik dan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Akai, N., Horiuchi, Y., & Masayo, S. (2005). *Short-run and Long-run Effects of Corruption on Economic Growth: Evidence from State-Level Cross-Section Data for the United States*. Working Papers Asia Pacific School of Economics and Government The Australian National University.
- BPS. (2018). *Potret Pendidikan Indonesia Statistik Pendidikan*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Cho, W., & Kirwin, M. F. (2007). *A Vicious Cycle of Corruption and Mistrust in Institutions in Sub-Saharan Africa: A Micro-Level Analysis*. Afrobarometer Working Paper No. 71, Michigan State University.
- Cieslik, A., & Goczek, L. (2017). Control of corruption, international investment, and economic - Evidence from panel data. *World Development* 103, 323-335.
- Clarkea, G. R., & Xua, L. C. (2004). Privatization, competition, and corruption: how characteristics of bribe takers and payers. *Journal of Public Economics* 88, 2067 - 2097.
- Clausen, B., Kraay, A., & Nyiri, Z. (2011). Corruption and Confidence in Public Institutions: Evidence from a Global Survey. *The World Bank Economic Review* Vol.25 No.2, 212 - 249.
- Erlangga, D., Shehzad, A., & Bloor, K. (2019). The impact of public health insurance on healthcare utilisation in Indonesia: evidence from panel data. *International Journal of Public Health*, 603-613.
- Fried, B., Lagunes, P., & Venkataramani, A. (2010). Corruption and Inequality at the Crossroad: A Multimethod Study of Bribery and Discrimination in Latin America. *Latin American Research Review* Vol. 45, No. 1, 76-97
- Groenewegen, J., Spithoven, A., & Berg, A. V. (2010). *Institutional Economics An Introduction*. New York: Palgrave Macmillan.
- Guerrero, M., & Rodriguez-Oreggia, E. (2005). On the individual decision to commit corruption: A methodological complement. *Journal of Economic Behavior & Organization*, 357-372.
- Habibov, N., Afandi, E., & Cheung, A. (2017). Sand or grease? Corruption-institutional trust nexus in post-Soviet countries . *Eurasian Studies*, 172-184.
- Hahn, E. D., & Soyer, R. (2007). Probit and Logit Models: Differences in the Multivariate Realm. Diambil kembali dari gwu.edu: <http://home.gwu.edu/~soyer/mv1h.pdf>
- Hunt, J. (2007). How Corruption Hits People When They Are Down.

- Journal of Development Economics*
Vol. 84, 574-589.
- Hunt, J. (2010). Bribery in health care in Uganda. *Journal of health economics* Vol 29 (5), 699-707.
- Hunt, J., & Laszlo, S. (2012). Is Bribery Really Regressive? Bribery's Costs, Benefits, and Mechanisms. *World Development Volume* 40, 355 - 372.
- Huntington, S. P. (1968). *Political Order in Changing Societies*. New Haven: Yale University Press.
- Jaccard, J. (2001). *Interaction Effects in Logistic Regression*. California: Sage Publications, Inc.
- Justesen, M. K., & Bjornskov, C. (2014). Exploiting the Poor: Bureaucratic Corruption and Poverty in Africa. *World Development Volume* 58, 106 - 115.
- Kaufmann D., K. A.-L. (1999b). Governance. World Bank, Working Paper No. 2196.
- Kementerian Kesehatan. (2019). Data dan Informasi Profil Kesehatan Indonesia 2018. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Ko, K., & Moon, S.-G. (2014). The relationship between religion and corruption: are the proposed causal links empirically valid? *International Review of Public Administration* 19:1, 44-62.
- Kuncoro, A. (2006). Corruption and Business Uncertainty in Indonesia. *ASEAN Economic Bulletin*. 23., 11-30.
- Lavallée, E., & Mireille Razafindrakoto, F. (2008). *Corruption and trust in political institutions in sub-Saharan Africa*. CSAE Conference 2008 - Economic Development in Africa, (hal. pp.21). Oxford, United Kingdom.
- Leys, C. (1965). What is the problem about corruption. *The Journal of Modern African Studies*, 3, 2, 215-230.
- Mauro, P. (1995). Corruption and Growth. *The Quarterly Journal of Economics*, Vol 110, No. 3, 681 - 712.
- Mauro, P. (2004). The Persistence of Corruption and Slow Economic Growth. *IMF Staff Papers*, 51 (1), 1-18.
- Mbate, M. (2017). Who bears the burden of bribery? Evidence from public service delivery in Kenya. *Development Policy Review Volume* 36, 321 - 340.
- Meon, P.-G., & Sekkat, K. (2005). Does corruption grease or sand the wheels of growth? *Public Choice* 122, 69–97.
- Meon, P.-G., & Weill, L. (2010). Is Corruption an Efficient Grease? *World Development Vol.* 38, No. 3, 244–259.
- Myrdal, G. (1971). *Asian Drama*. New York: Penguin Books.
- Peiffer, C., & Rose, R. (2018). Why are the Poor More Vulnerable to Bribery in Africa? The Institutional Effects of Services. *The Journal of Development Studies*, 54:1, 18-29.

- Rose, R., & Peiffer, C. (2015). *Paying Bribes for Public Services: A Global Guide to Grass-Roots Corruption*. London: Palgrave Macmillan.
- Rose-Ackerman, S. &. (2016). Culture and Corruption. *Dalam S. &. Rose-Ackerman, Corruption and Government: Causes, Consequences, and Reform* (hal. 233-272). Cambridge: Cambridge University Press.
- Searle, J. (1995). *The Construction of Social Reality*. New York: Free Press.
- Shaw, P., Pecoraro, B., & Katsait, M.-S. (2015). On The Determinants Of Educational Corruption: The Case of Ukraine. *Contemporary Economic Policy*, Vol.33 No.4, 698–713.
- Søreide, T. (2009). Too Risk Averse to Stay Honest? Business Corruption, Uncertainty and Attitudes Toward Risk. *International Review of Law & Economics* 388.
- Weber, M. (1958). *From Max Weber: Essays in sociology*. New York: Oxford University Press.
- Wooldridge, J. M. (2010). *Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data*. Cambridge: The MIT Press.
- Worldbank. (2017, October). Menuju Sistem Bantuan Sosial yang Menyeluruh, Terintegrasi, dan Efektif di Indonesia. Diambil kembali dari [worldbank.org: http://documents.worldbank.org/curated/en/633541509966962905/pdf/120905-REVISED-PUBLIC-Screen-](http://documents.worldbank.org/curated/en/633541509966962905/pdf/120905-REVISED-PUBLIC-Screen-)

INDONESIAN-BAHASA-1130-
update.pdf

Lampiran 1 Pertanyaan Kuesioner

No Q.	Variabel - Label	Pertanyaan dalam Kuesioner dan koding	Formula
Q36.	Pertanyaan Filter	Dalam satu tahun terakhir, pernahkah Ibu/Bapak atau keluarga Ibu/Bapak berhubungan dengan pemerintah dalam hal dibawah ini? Untuk memperoleh pelayanan kesehatan Berurusan dengan bagian administrasi atau guru di sekolah negeri Berurusan dengan polisi Mengurus kelengkapan administrasi (KTP, KK, Akta Kelahiran)	Lanjut ke Q37
Q37	Pertanyaan Filter	Jika pernah berhubungan dengan pegawai pemerintah, Apakah Ibu/Bapak atau keluarga Ibu/Bapak pernah diminta memberikan hadiah/uang untuk mendapatkan pelayanan yang Ibu/Bapak butuhkan di luar biaya resmi? (a – d sama dengan diatas)	Lanjut ke Q38
Q38	Pengalaman Suap	Jika pernah diminta memberikan hadiah/uang, apakah Ibu/Bapak memberi hadiah/uang seperti yang diminta tersebut? (a – d sama dengan diatas; Ya = 1, lainnya = 0)	Lanjut ke Q39 - > Q40
Q40	Pengalaman Suap	Jika pernah berhubungan dengan pegawai pemerintah, Apakah Ibu/Bapak atau keluarga Ibu/Bapak pernah memberikan hadiah/uang untuk mendapatkan pelayanan yang Ibu/Bapak butuhkan tanpa diminta pegawai pemerintah? (a – d sama dengan diatas; Ya = 1, lainnya = 0)	
Q17	Pertanyaan Filter	Apakah Ibu/Bapak tahu atau pernah dengar program Kartu Indonesia Sehat (KIS) dari pemerintah? (Pewawancara: KIS yang dimaksud adalah KIS gratis dari pemerintah, bukan BPJS Kesehatan)	Lanjut ke Q18 - > Q19
Q19	Kemiskinan	Apakah keluarga Ibu/Bapak ini menerima Kartu Indonesia Sehat (KIS) tersebut? (Ya = 1, lainnya = 0)	
Q10	Persepsi Kualitas Pelayanan	Bagaimana penilaian Ibu/Bapak terhadap kondisi ... yang ada di daerah sekitar tempat tinggal Ibu/Bapak saat ini? (Buruk dan Sangat Buruk = 1, lainnya = 0) Pelayanan aparat pemerintah kepada warga Kualitas pelayanan pendidikan Kualitas pelayanan kesehatan Kondisi keamanan dan ketertiban	
QB.	Gender	Gender dari responden. (Perempuan = 1; Laki-laki = 0)	
QC.	Urban	Kategori Desa-Kota. (Kota = 1; Desa = 0)	
Q1.	Umur	Usia Ibu/Bapak saat ini	
Q102	Pendidikan	Tingkat Pendidikan (1 = tamat SMP; 2 = Tamat SMA; 3 = Diploma – S3)	
Q103	Pekerjaan	Apakah saat ini Ibu/Bapak bekerja? (1 = bekerja, 0 = lainnya)	
Q104	Wiraswasta	Dimana Ibu/Bapak bekerja saat ini? (1 = wiraswasta, 0 = lainnya)	
Q97	Nilai Agama	Seberapa sering Ibu/Bapak mempertimbangkan perintah atau nilai-nilai agama ketika membuat keputusan penting bagi hidup Ibu/Bapak sendiri? (Jawaban 4 = sangat sering, 3 = cukup sering, 2 = jarang, 1 = tidak pernah)	
Q30.	Nilai Anti - Korupsi	Menurut pendapat Ibu/Bapak, apakah merupakan hal yang wajar atau tidak wajar bagi masyarakat Indonesia memberikan sesuatu seperti: uang, barang, hiburan, hadiah di luar persyaratan/ketentuan untuk memperlancar suatu proses atau sebagai bentuk terima kasih ketika berhubungan dengan instansi pemerintah? (1 = tidak wajar; 0 = wajar)	

Lampiran 1 Odds Ratio

VARIABLES	(1)	(2)	(3)	(4)
	Bribe Administration Odds Ratio	Bribe Police Odds Ratio	Bribe Health Odds Ratio	Bribe Education Odds Ratio
Poor	1.241 (0.215)	1.214 (0.372)	0.662 (0.179)	1.122 (0.344)
Public Service Quality	2.826*** (0.803)	1.729 (0.804)	0.636 (0.388)	2.989* (1.838)
Poor x Pub Serv Quality	1.153 (0.575)	2.056 (1.549)	11.51*** (8.775)	0.364 (0.447)
Urban	1.372* (0.238)	1.117 (0.312)	0.622* (0.161)	1.048 (0.332)
Age	0.983** (0.00680)	0.973** (0.0115)	0.957*** (0.00910)	0.974* (0.0148)
Gender	0.876 (0.175)	0.640 (0.215)	0.365*** (0.122)	0.818 (0.297)
Education	0.787*** (0.0663)	0.903 (0.135)	0.810 (0.109)	1.048 (0.174)
Employment	0.950 (0.208)	1.137 (0.440)	0.665 (0.238)	0.926 (0.390)
Business	1.371 (0.329)	1.080 (0.368)	2.460*** (0.824)	1.568 (0.678)
Religious	0.857 (0.0915)	0.583*** (0.114)	1.008 (0.164)	0.754 (0.158)
Perceive Corruption	0.463*** (0.0770)	0.909 (0.306)	0.408*** (0.0997)	0.648 (0.205)
Constant	1.605 (0.795)	9.969*** (8.874)	2.905 (2.119)	0.992 (0.877)
Observations	1,290	390	1,373	778
Pseudo R2	0.0656	0.0678	0.118	0.0334

Robust standard errors in parentheses

*** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$

Lampiran 2 Efek Margin

```
. margins, dydx(*)

Average marginal effects          Number of obs   =   1,290
Model VCE      : Robust

Expression   : Pr(briadm), predict()
dy/dx w.r.t. : 1.kis 1.public urban age gender education employment business religius1 value
```

	Delta-method				
	dy/dx	Std. Err.	z	P> z	[95% Conf. Interval]
1.kis	.0403156	.0280654	1.44	0.151	-.0146915 .0953227
1.public	.2224908	.0536272	4.15	0.000	.1173834 .3275983
urban	.0536446	.0294404	1.82	0.068	-.0040576 .1113468
age	-.0028332	.0011709	-2.42	0.016	-.0051281 -.0005383
gender	-.0225346	.0338906	-0.66	0.506	-.088959 .0438897
education	-.0406574	.0143076	-2.84	0.004	-.0686999 -.012615
employment	-.0086795	.0372102	-0.23	0.816	-.0816103 .0642512
business	.0535312	.0406019	1.32	0.187	-.0260471 .1331095
religius1	-.026181	.0180883	-1.45	0.148	-.0616333 .0092713
value	-.1308128	.027331	-4.79	0.000	-.1843806 -.0772449

Note: dy/dx for factor levels is the discrete change from the base level.

```
. margins, dydx(*)

Average marginal effects          Number of obs   =   390
Model VCE      : Robust

Expression   : Pr(bripol), predict()
dy/dx w.r.t. : 1.kis 1.security urban age gender education employment business religius1 value
```

	Delta-method				
	dy/dx	Std. Err.	z	P> z	[95% Conf. Interval]
1.kis	.0588359	.0584745	1.01	0.314	-.0557721 .1734439
1.security	.1807049	.0827892	2.18	0.029	.0184411 .3429686
urban	.0226888	.0575317	0.39	0.693	-.0900712 .1354488
age	-.0056154	.0023602	-2.38	0.017	-.0102413 -.0009896
gender	-.0917687	.0680298	-1.35	0.177	-.2251047 .0415673
education	-.0209129	.0306012	-0.68	0.494	-.0808901 .0390644
employment	.026383	.0796304	0.33	0.740	-.1296897 .1824556
business	.0158597	.0700137	0.23	0.821	-.1213646 .153084
religius1	-.1109221	.0380095	-2.92	0.004	-.1854194 -.0364247
value	-.0197106	.0693026	-0.28	0.776	-.1555412 .11612

Note: dy/dx for factor levels is the discrete change from the base level.

